

PERAN LEMBAGA PERMODALAN DALAM PEMBIAYAAN SEKTOR AGRIBISNIS DITINGKAT PERTANIAN RAKYAT DI SUMATERA SELATAN

Mustopa Marli Batubara ¹

Abstract

The approach of this writing , through basic metod research conducted to find the answer over the problem of financing agrobiz sector, aspecially community farming spread widely over village area in South Sumatera. Financing agrobiz sectors over community farming is worth to afford by developing capital institution which functions the available institution exist, before such as cooperation , farmers group, and other enterprise institution by adopting the partnerships joint venture with financial or banking institution, and other enterprise body / organization.

Key words : *Financing agrobiz sectors and Community farming.*

Sampai saat ini banyak kalangan menilai bahwa sektor pertanian memiliki banyak permasalahan, namun disisi lain, sektor pertanian sebagaimana diketahui memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia diantaranya sebagai penghasil devisa, sektor yang terbesar menyerap tenaga kerja (sekitar 73% dari angkatan kerja nasional) dan menampung 90% usaha kecil menengah.

Sektor pertanian merupakan salah satu dari *care business* di Sumatera Selatan dan merupakan salah satu pilar penyokong pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu, terbukti sektor ini masih dapat bertahan dimasa krisis, dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi

ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.

Berlakunya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten/ kota menimbulkan perubahan yang fundamental dalam keseluruhan sistem kewenangan pemerintahan termasuk dalam proses pelayanan yang berhubungan dengan penanaman modal. Disamping itu, persaingan dalam menarik investasi di dalam negeri cenderung meningkat semakin tajam pada berbagai sektor terutama sektor PMDN dan PMA.

sektor pertanian terutama pada pertanian rakyat ternyata sulit sekali ditemukan investor menanamkan

modalnya pada sektor ini sehingga sangat sulit menempatkan pertanian sebagai sektor ekonomi yang berdiri sendiri, dimana berdasarkan cakupan pelaku maupun keterkaitan antar kelembagaan akan berkaitan dengan kebijakan moneter, infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia serta kebijakan perdagangan dalam maupun luar negeri.

Secara umum kelembagaan keuangan menjalankan fungsi pembiayaan di Indonesia meliputi Bank Umum Milik Negara (BUMN), bank swasta nasional, bank asing, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan lembaga keuangan non bank. Namun, banyaknya lembaga keuangan tersebut yang serius dan konsisten dalam pembiayaan sektor pertanian masih sangat terbatas. Data berikut menunjukkan kondisi dan perkembangan penyaluran kredit termasuk kredit untuk sektor pertanian ;

1. Jumlah kredit lebih rendah daripada himpunan di bank secara nasional jumlah himpunan dana di perbankan Rp. 1.018 triliun tahun 2005, namun jumlah kredit yang disalurkan hanya sebesar Rp. 635,9 triliun. Di Sumatera Selatan tahun 2005 jumlah himpunan dana di perbankan Rp. 14,6 triliun sedangkan yang tersalurkan berupa kredit sebesar Rp. 9,6 triliun (65%) dalam hal ini menunjukkan masih ada kesenjangan yang besar antara potensi suplai dengan utilitasnya (kredit).
2. Proporsi kredit untuk sektor pertanian masih rendah. Secara nasional hanya Rp. 33,4 triliun pada

tahun 2005 atau hanya 5,3% dari total kredit perbankan.

3. Peran BPD masih relatif kecil. Kredit pertanian 61% dilayani oleh bank pemerintah 27 % oleh bank swasta nasional, 7% oleh bank asing (campuran) dan 4% oleh bank pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang, secara garis besar maka permasalahannya adalah: Apakah lembaga permodalan di tingkat pedesaan dapat berfungsi dalam pembiayaan sektor agribisnis terutama pertanian rakyat yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan terutama di Sumatera Selatan.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai agribisnis, perlu dikemukakan batasan mengenai agribisnis itu sendiri. Sampai saat ini, berbagai pihak mengartikan agribisnis dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, sebagian besar kalangan mengidentikkan agribisnis dengan agroindustri. Pihak lain menganggap bahwa agribisnis berupa perusahaan-perusahaan pertanian skala besar dan karenanya berorientasi pada keuntungan.

Interpretasi seperti di atas terlalu membatasi agribisnis dalam pengertian yang sempit. Definisi agribisnis yang lebih luas dikemukakan oleh Downwy dan Erickson (1987) yaitu sebagai berikut : "*Agribusiness include all those business and amangement activities performed by firm that provide inputs to the farm sector, produce farm product and or process, transport, finance, handle, or market farm product*".

Agribisnis merupakan sistem yang utuh dan saling berkaitan diantara seluruh kegiatan ekonomi (yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis usahatani/ budidaya, subsistem agribisnis hilir, subsistem jasa penunjang agribisnis) yang terkait langsung dengan pertanian.

Menyangkut lingkup sektor agribisnis sebagai sektor yang perlu dibiayai bila mengacu definisi agribisnis meliputi :

1. Subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) yang meliputi usaha/ industri yang menghasilkan sarana produksi pertanian seperti pembibitan, agrokimia, pestisida, alat/ mesin pertanian, makanan ternak dan lain-lain.
2. Subsistem agribisnis usahatani (*on-farm agribusiness*) yang meliputi kegiatan budidaya pertanian termasuk perkebunan, kehutanan, perternakan dan perikanan.
3. Subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) yang meliputi berbagai kegiatan pengolahan produk primer menjadi produk antara (*intermediary product*) maupun kegiatan pengolahan produk primer antara menjadi produk akhir (*finished product*).
4. Subsistem jasa penunjang agribisnis (*supporting services*) yang meliputi kegiatan usaha dalam mendukung usaha agribisnis seperti perdagangan produk agribisnis.

Pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam memulai kelayakan usaha sektor

agribisnis dan non agribisnis. Permasalahan-permasalahan klasik seperti manajemen, sistem informasi, pemasaran, perijinan dan agunan agar bisa muncul baik pada nasabah agribisnis maupun non agribisnis. Namun demikian pembiayaan terhadap sektor agribisnis dinilai mengandung resiko yang relatif tinggi antara lain karena faktor-faktor seperti harga yang tidak stabil (sering berfluktuasi) dan sifat poduk yang tidak tahan lama (mudah rusak). Disamping hal tersebut, faktor *force majeure* seperti hama, penyakit dan bencana alam yang mengakibatkan gagal panen merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja pembiayaan agribisnis.

Pembiayaan sektor agribisnis bukanlah hal baru, yang secara singkat dapat diuraikan berikut :

1. Sebelum Deregulasi Perbankan 1983

Pada masa ini, dimana tingkat suku bunga dan penetapan pagu kredit ditetapkan sepenuhnya diatur oleh pemerintah, lembaga perbankan yang diberi tugas sebagai agan pembangunan dengan tugas utama memberikan kredit kepada sektor koperasi, tani dan nelayan seperti lembaga perbankan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Tugas BRI menyalurkan kredit program Bimbingan masal (Bimas) dengan bantuan kredit likuiditas dari Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian pada umumnya dan program swasembada beras pada khususnya.

Pada program ini muncul permasalahan yaitu tingginya *non performing loan* (tunggakan) yang antara lain disebabkan oleh: pengucuran dana pada pelaksanaannya cenderung diberikan untuk memenuhi target pemerintah dan kurang dikaitkan dengan kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman yang diterima, kualitas tanah yang diusahakan oleh para petani seringkali lebih rendah dari jenis/ kualitas tanah yang ditentukan, dan permasalahan lain terdapat banyak penerima kredit bukan dari kalangan petani yang berhak, tetapi justru dari oknum-oknum yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kegiatan pertanian.

Kredit Bimas kemudian dihentikan sejak musim tanam 1985 dan diganti dengan kredit usahatani yang pemberiannya disalurkan melalui kantor cabang BRI kepada KUD untuk diberikan kepada petani anggota.

2. Setelah Era Deregulasi Perbankan 1983

Deregulasi perbankan tahun 1983 yang berisi penghapusan sistem pagu pinjaman, kebebasan penentuan suku bunga, dan pengurangan kredit likuiditas Bank Indonesia, telah memberikan kesempatan sekaligus tantangan kepada perbankan terutama BRI untuk melakukan reorientasi keberadaan perbankan dari yang semula hanya sebagai lembaga perantara keuangan yang *non profit oriented* menjadi lembaga keuangan yang berorientasi pada *profit oriented*.

Perubahan mendasar lainnya adalah sejak diundangkannya UU No. 7 tahun 1992, dimana bank-bank pemerintah berubah status menjadi bank umum, sehingga *portofolio* kredit mengalami perubahan, namun pemberian kredit sektor agribisnis tetap menjadi prioritas. Selanjutnya, sejak Juli 1993 pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham terbesar telah memutuskan bahwa BRI dalam pembiayaan kepada sektor agribisnis diperkenankan memberikan kredit di atas Rp. 50 miliar sampai dengan maksimal 85% dari batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia, namun secara keseluruhan portofolio kredit BRI minimal 80% harus tetap berada pada usaha kecil menengah.

Pembahasan

Proses industrialisasi nasional yang gencar, cepat dan berhasil dengan beberapa dekade terakhir ternyata belum mengait kebelakang (*backward linkage*) yakni ke sektor pertanian. Inilah yang mengakibatkan tertinggalnya sektor pertanian dari industri. Tidak saja dalam struktur PDB, tetapi juga dalam struktur masyarakat yang bergerak dibidang industri. Nilai tukar petani yang belum juga membaik, produktivitas dan efisiensi yang rendah, serta sikap mental dan budaya yang masih tradisional membawa sektor pertanian rakyat pada ketertinggalan.

Pada sisi lain, menghadapi perubahan struktur perdagangan bebas yaitu dengan perubahan pasar dunia melalui WTO serta kesepakatan-

kesepakatan perdagangan kawasan seperti APEC, AFTA, NAFTA serta Uni Eropa sudah menjadi *hardfact* yang sulit terelakan bagi Indonesia. Perubahan pasar dunia tersebut berhadapan dengan realitas pelaku pertanian dan agribisnis yang amat kompleks.

Perdagangan bebas tersebut akan memperluas perdagangan internasional yang lebih terbuka, transparan dan kompetitif. Kenyataan ini akan menjadi peluang (*opportunity*) bila masyarakat pertanian Indonesia telah siap bersaing, tetapi juga menjadi ancaman (*threat*) bila tidak siap. Kesiapan bersaing ditentukan oleh tingkat produktivitas dan efisiensi yang diakselerasikan oleh penggunaan teknologi, sikap mental modern, serta panen yang dalam standar mutu suatu produk khususnya dalam kesehatan dan lingkungan serta persaingan harga menjadi kecenderungan pasar.

Penanganan agribisnis oleh para petani di Sumatera Selatan dilihat dari skala kepemilikan dan penguasaan lahan. Secara umum belum memenuhi syarat bagi penerapan keseluruhan mata rantai agribisnis yang meliputi hulu, budidaya, hilir, pengolahan maupun pemasaran serta pemanfaatan jasa penunjang.

Berbagai konsep dari pemerintah dengan melakukan penggabungan para petani kedalam koperasi/ badan usaha non koperasi menjadi penting dilihat dari kepentingan konsumen yang mempersyaratkan komoditas pada jumlah (kuantitas), tingkat standar mutu (kualitas),

kepastian *delivery* serta penetapan harga secara tepat. Bergabungnya petani kedalam lembaga usaha seperti koperasi maupun badan usaha non koperasi menjadikan petani sebagai bagian dari lembaga usaha permodalan sehingga berkeelayakan menerapkan manajemen penguasaan komoditas hasil pertanian dalam pelaksanaannya, koperasi kelompok petani maupun koperasi/ lembaga usaha non koperasi belum sampai kepada harapan akan terwujudnya kelompok tani maupun koperasi sebagai entitas usaha (bisnis). Bergesernya preferensi konsumen akan suatu hasil pertanian tidak dapat diikuti oleh kemampuan kelompok tani maupun koperasi menyediakan bentuk, *delivery time*, tata cara pembayaran dan penyediaan sebagai keinginan konsumen dari petani anggota koperasi yang juga sebagai konsumen.

Rendahnya kemampuan kelembagaan usaha petani (kelompok maupun koperasi) dalam menjawab masalah keterbatasan sumber daya internal produsen telah menjadi suatu penyebab rendahnya aspirasi masyarakat memilih investasi dibidang pertanian dan kondisi berikutnya berdampak pada rendahnya penyediaan hasil pertanian sebagai bahan baku industri maupun suplai hasil pertanian ke pasaran konsumsi.

Pembiayaan Usahatani

Pengalaman pembiayaan agribisnis dalam subsistem usahatani/ budidaya (*farming*) tidak terasa oleh petani khususnya pertanian rakyat secara signifikan dapat meningkatkan

kesejahteraan. Subsistem usahatani merupakan subsistem proses biologis yang mendapat nilai tambah lebih kecil dibandingkan dengan yang lain dinilai dari satuan waktu. Oleh karena itu, para investor relatif tidak begitu tertarik pada sistem ini, lebih-lebih apabila tidak ada kebijakan yang menciptakan *cost of capital* yang lebih rendah dibandingkan dengan subsistem lain.

Skim kredit seperti kredit usahatani (KUT) bagi petanian rakyat yang telah dikururkan kepada sebagian petani nampaknya belum ada ketegasan atas aturan yang membedakan KUT sebagai kredit investasi dan kredit modal kerja atau kredit konsumsi. Mengingat banyaknya penyalahgunaan kredit oleh petani dimana pada sektor pertanian kebutuhan pertanian akan biaya diawal musim tahun dibarengi dengan masa paceklik yang membutuhkan dana untuk konsumsi. Selain itu, kredit yang skala kecil untuk pertanian kurang *cost effective* meskipun tingkat pengembalian baik.

Penyaluran KUT melalui bank yang besarnya sesuai RDKK selama ini pencairannya sering tidak sesuai dengan waktu tanam, sehingga terjadi penyimpangan penggunaan kebutuhan dana yang produktif kepada kebutuhan konsumtif.

Disisi lain, sektor agribisnis khususnya pada pertanian rakyat yang telah lama dilakukan sebagai usaha rakyat serta usaha kecil dan menengah relatif mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal ini dapat dilihat, diantaranya: Akibat

dampak krisis ekonomi nasional tahun 1998, ekonomi mengalami kontraksi sebesar 13,68%. Sementara sektor pertanian tetap tumbuh sebesar 0,22%, dan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan struktural pembangunan nasional yang ditunjukkan oleh kontribusi kedua terbesar (18,84%) dalam pembentukan GDP nasional. Selanjutnya, sumbangan sektor pertanian terutama yang berorientasi ekspor akan lebih tahan terhadap gejolak krisis ekonomi (komoditas yang paling berperan seperti halnya karet alam) (Nancy, Chairil Anwar dan Sinung Hendratno. 1998).

Kemudian, Batubara, M.M 2004, fenomena yang terjadi pasca krisis moneter berdampak positif bagi petani karet di lapangan yaitu terdapat semakin meningkatnya petani karet dalam melakukan penanaman karet baru dengan permodalan/ investasi secara swadaya/ mandiri. Petani karet mampu menginvestasikan ke kebun karet baru sebesar 12% dari pendapatan rumah tangga, secara keseluruhan petani karet tersebut mampu menyisihkan pendapatan untuk ditabung sebesar 15% dari pendapatan untuk investasi ke usahatani kembali dan sumber daya manusia (berupa pendidikan anak-anak).

Kondisi pertanian yang berorientasi ekspor ternyata tidak diikuti oleh pertanian yang komoditasnya lebih ditekankan kepada kebutuhan konsumsi dalam negeri seperti komoditas pangan. Penelitian pengembangan produk padi dengan sistem budidaya organik oleh

Tim Peneliti Fakultas Pertanian UMP (2006) mendapatkan informasi bahkan permodalan petani padi sawah selama ini didapat dari pinjaman yang dikenal dengan pinjaman Yarnen (bayar setelah panen) dari berbagai sumber keuangan non formal yang ada di pedesaan tersebut, pola pembiayaan tersebut dihadapkan kepada resiko dan ketidakpastian produksi pertanian dan akan menjadi beban psikologis petani-petani kecil.

Pengembangan Pembiayaan Agribisnis

Pengembangan pembiayaan di sektor agribisnis terutama pada pertanian rakyat dengan pendekatan pada lembaga permodalan ditingkat sentra produksi terlebih dahulu dilakukan penguatan dan pemberdayaan kelembagaan yang telah ada di sektor pertanian (seperti; kelompok tani, koperasi dan lembaga non koperasi, dan lain-lain) yang kebanyakan kelembagaan tersebut menghadapi berbagai kendala, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya modal, lemahnya manajemen, dan sebagainya yang dianggap sebagai penyakit kronis kelembagaan pedesaan. Karena itu, diperlukan upaya untuk menguatkan dan memberdayakan kelembagaan tersebut sehingga mampu berperan setara dengan kelembagaan lainnya yang lebih maju (seperti, perusahaan, penyedia saprodi, pedagang dan perusahaan processing hasil) dalam mata rantai proses produksi dan distribusi hasil pertanian. Upaya yang

perlu dilakukan dengan memfasilitasi usaha (*linkage*) diantara kelembagaan tersebut baik keterkaitan secara horizontal (*forward and backward linkage*) maupun keterkaitan secara vertikal.

Untuk memacu usaha pertanian rakyat menjadi usaha ekonomi yang bernilai *profit* maka suatu upaya pengembangan lembaga permodalan dengan mengembangkan kelembagaan keuangan yang didekatkan dipedesaan dan adanya upaya perbaikan manajemen pada lembaga usaha yang sudah ada seperti koperasi atau lembaga usaha non koperasi terutama kepada pengembangan bidang keuangan dengan pola kemitraan dari lembaga perbankan, lembaga keuangan atau badan usaha lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Simpulan

Sektor agribisnis merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu, pembiayaan terhadap sektor agribisnis harus menjadi perhatian oleh pemerintah, lembaga perbankan dan lembaga usaha lainnya berwujud lembaga permodalan yang didekatkan pada sentra produksi atau berada di wilayah pedesaan. Pembiayaan agribisnis dapat berupa pemberian kredit usahatani dengan pendekatan *profit oriented* dan dilakukan secara profesional, mudah dijangkau baik secara administrasi maupun waktu pengucuran dana serta mempertimbangkan prinsip pemberian kredit yang sehat.

Kepustakaan

- Batubara, M.M. 2004. **Kemampuan Ekonomi Petani Karet Dalam Melakukan Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Usahatani (Kasus pada Petani Binaan UPP TCSDP di Sumatera Selatan).** Disertasi. PPs Unpad. Bandung.
- Danusaputro, M., Yusuf. M. Cotler dan Pandu Suharto. 1997. **Moneterisasi Pedesaan (Bunga Rampai Keuangan Indonesia).** Edisi Ke-2. Institut Bankir Indonesia. Jakarta.
- Downey. W.D dan Steven. P. Erickson. 1987. **Agribusiness Management.** McGraw Hill.
- Mohd Nasir. 1998. **Metode Penelitian.** Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nancy, Cicilia, Chaill Anwar dan Sinung Hendratno. 1998. **Tingkat Kesejahteraan Petani Karet**
- Didalam Kondisi Krisis Moneter.** Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Vol. XLVI No. 4 Tahun 1998. Hal 427 - 435.
- Pusat Penelitian SEP dan Balitbang Pertanian. 1993. **Perspektif Pengembangan Agribisnis di Indonesia.** Prosiding. Penyunting; Tahlim Sudaryanto, Effendi Pasandaran dan Achmad Jauhari. Bogor. 74 hal.
- Tim Penyusun Master Plan FP Unsri. 2005. **Master Plan Lumbung Pangan Sumatera Selatan.** Kerjasama; Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Palembang.
- Tim Peneliti FP UMP. 2006. **Laporan Penelitian Program Padi Organik.** Kerjasama; Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang dengan Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas.